

IMPLEMENTASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN (PNPM MPd)

**(Studi Kasus Bidang Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP) Perguliran
Desa Jenggawah Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember)**

Dhenok Wahyu Ardhini¹⁾, Ida Mustikawati²⁾.

¹⁾ Prodi Ilmu Administrasi Negara

STIA Pembangunan Jember

email: dhenok.ardhini@yahoo.com

²⁾ Dosen Prodi Ilmu Administrasi Negara

STIA Pembangunan Jember

email: idamustikawati60@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd) khususnya pada kegiatan Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP) dana bergulir di Desa Jenggawah Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai proses kegiatan SPP Perguliran dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga penyelesaian. Evaluasi ini juga untuk mengetahui apakah program SPP Perguliran sudah berjalan sesuai dengan aturan yang dibuat dalam Standard Operasional dan Prosedur (SOP) Kecamatan Jenggawah maupun dalam Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM MPd. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Sumber data diperoleh dari Kantor Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Kecamatan Jenggawah. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Observasi, Wawancara dan dokumentasi. Alat pengumpulan data utama peneliti yakni lembar observasi, pedoman wawancara dan dokumen. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP) Perguliran di Desa Jenggawah Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember dalam tahapan pelaksanaannya sangat efektif. Tetapi ada sedikit ketidaksinkronan yaitu ada beberapa anggota yang tidak jujur pada saat verifikasi sehingga hasil verifikasi tidak semuanya valid. Hal ini mengakibatkan anggota yang seharusnya tidak layak mendapatkan pinjaman menjadi lolos mendapatkan bantuan pinjaman. Kurangnya kekompakan antara UPK dan Kelembagaan yang lain juga mengakibatkan kegiatan SPP kurang optimal. Walaupun masih terdapat kekurangan tetapi dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan target dan aturan yang ada dalam SOP maupun PTO Kecamatan Jenggawah PNPM MPd.

Kata kunci : Implementasi, PNPM Mandiri Perdesaan, SPP Perguliran

ABSTRACT

The findings of data from female head of household in Sruni Village require empowerment activities for female household heads in Sruni Village with the name of the PETARUNG TERORIS village in Sruni. With the aim of (1) Creating new economic opportunities for female household heads in Sruni Village in fulfilling their economic needs as household heads who have responsibilities as breadwinners in their families, (2) Increasing knowledge of female household heads in Sruni Village during the period activities took place from training to direct assistance, (3) Encouraging female heads of household in Sruni Village to realize that skills are needed for them in creating their own economic opportunities. This activity was carried out for three months with several methods of implementation, namely observation for one week, training conducted for two weeks, mentoring carried out for two months, and evaluation. With the method that has been done, the results obtained are (1) Establishment of Sruni village head women's organization in joint learning efforts in following up on the training activities that have been obtained, (2) There is an increase in skills of female household heads in Sruni Village as initially having their original skills they have new skills, namely batik shibori, (3) There is an increase in knowledge and insight for female household heads in Sruni Village who are implemented directly from the production process to the marketing process. So that with this activity the female head of household in Sruni Village became motivated in following up this activity as their business activity in creating new economic opportunities for them in their responsibilities as the head of their family's household.

Keywords: Empowerment, Women, Skills, Knowledge

1. PENDAHULUAN

1.1 Lata Belakang

Indonesia termasuk Negara miskin sumber daya manusianya, namun kaya akan sumber daya alamnya. Tetapi pada realitanya banyak masyarakat Indonesia yang tidak memiliki pekerjaan karena tidak memiliki ketrampilan dan modal usaha untuk mengembangkan usahanya. Diperparah lagi dengan anggapan bahwa kaum perempuan tidak layak untuk bekerja kecuali mengurus anak dan suami serta rumah. Hal ini masih berlaku untuk masyarakat pedesaan serta masyarakat primitif yang ada di pedalaman yang tersebar diseluruh pelosok Indonesia.

Sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, Indonesia berhak menentukan nasib bangsanya sendiri, hal ini diwujudkan dalam bentuk pembangunan. Menurut Sondang P. Siagian (1999), pembangunan merupakan suatu usaha atau rangkaian pertumbuhan dan perubahan yang terencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, pemerintah menuju pada modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM Mandiri) merupakan salah satu program pemerintah yang berfungsi untuk meningkatkan efektifitas penanggulangan dan penciptaan tenaga kerja di tingkat pedesaan dan perkotaan yang diluncurkan oleh pemerintah pada tahun 2007. Melalui PNPM Mandiri

dirumuskan kembali upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat, mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga tahap akhir. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui proses pembangunan partisipatif, kesadaran kritis, dan kemandirian masyarakat terutama masyarakat miskin, yang ditumbuhkembangkan sehingga mereka bukan lagi obyek melainkan sebagai subyek upaya penanggulangan kemiskinan (DEPDAGRI, 2008:3).

Kegiatan SPP merupakan salah satu jenis kegiatan yang secara nyata menunjukkan adanya keseriusan dari PNPM Mandiri untuk memprioritas pemberdayaan perempuan. Secara umum tujuan dari kegiatan SPP adalah untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam pedesaan, kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan serta mendorong pengurangan rumah tangga miskin dan penciptaan lapangan kerja. Kegiatan simpan pinjam perempuan merupakan suatu kegiatan dalam bentuk simpan pinjam, yang semua anggotanya adalah perempuan. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan bidang permodalan simpan pinjam perempuan untuk kelompok perempuan merupakan salah satu program yang dilaksanakan di Kabupaten Jember. Dan salah satu kecamatan yang melaksanakan program ini adalah Kecamatan Jenggawah. Kecamatan Jenggawah terdiri dari delapan desa yaitu Desa : Jenggawah, Wonojati, Kertonegoro, Kemuningsari Kidul, Sruni, Jatisari, Jatimulyo, Cangkring.

Dalam penelitian ini daerah yang dijadikan tempat penelitian yaitu Desa Jenggawah Kecamatan Jenggawah, yang khusus akan meneliti tentang pelaksanaan kegiatan SPP dari dana perguliran. Alasan peneliti mengambil desa ini karena diantara delapan desa di Kecamatan Jenggawah Desa Jenggawah merupakan desa yang memiliki paling banyak anggota kelompok Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP) yaitu dengan jumlah kelompok 35 kelompok dan 2.135 anggotakelompok. Selain mempunyai pemanfaat SPP terbesar Desa Jenggawah juga merupakan kelompok yang mempunyai tunggakan SPP terbesar ke tiga (ke-3) di Kecamatan Jenggawah oleh karena itu peneliti tertarik untuk menjadikan Desa Jenggawah sebagai tempat penelitian. Desa Jenggawah mempunyai jumlah penduduk sebesar 17.823 jiwa dengan jumlah rumah tangga miskin terbanyak ketiga di Kecamatan Jenggawah yaitu sebesar 884 jiwa.

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pada kegiatan Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP) Perguliran melalui PNPM MPd. Simpan Pinjam khusus Perempuan merupakan salah satu alternatif pemecahan permasalahan permodalan, bahkan sampai pada bantuan teknis, informasi, teknologi, manajemen, dan pasar. Program tersebut diperuntukkan bagi para wanita yang akan memulai usaha dan bagi wanita yang mempunyai usaha. Perempuan disini diberikan pinjaman dana (modal) untuk melancarkan usaha yang mereka miliki dan untuk membantu perekonomian keluarga.

Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dirasa sangat perlu untuk senantiasa dilaksanakan sebagai sebuah kebijakan dalam rangka membantu para kaum perempuan untuk membuka lahan usaha demi membantu meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga. Dengan demikian, pada hakikatnya program simpan pinjam khusus perempuan ini dilaksanakan tidak lain adalah untuk memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan dan mendongkrak ataupun mengurangi Rumah Tangga Miskin (RTM) serta perluasan penciptaan lapangan kerja khususnya bagi kaum perempuan. Program ini sasaran utamanya adalah rumah tangga miskin yang produktif yang memerlukan pendanaan kegiatan usaha ataupun kebutuhan sosial dasar melalui kelompok simpan pinjam khusus perempuan yang ada di masyarakat. Dalam bidang SPP ini, semua perempuan dapat mengajukan bantuan dengan syarat dan ketentuan yang ada dalam Petunjuk Teknis Operasional (PTO) serta Standart Operasional dan Prosedur (SOP) SPP Perguliran Kecamatan Jenggawah. serta dalam peminjaman tidak ada jaminan.

1.2 Rumusan masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu ingin mengetahui “Bagaimanakah Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd) (Studi kasus bidang Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP) Perguliran di Desa Jenggawah Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember)?”.

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd) (Studi kasus bidang Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP) Perguliran di Desa Jenggawah Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember).

1.4 Manfaat Kegiatan

Manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah :

a. Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu administrasi publik khususnya mengenai perencanaan, pembangunan, monitoring, dan evaluasi.

b. Praktis

Bagi Pelaksana PNPM MPd Kecamatan Jenggawah, hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan positif untuk menambah bahan masukan positif untuk meningkatkan kualitas kinerja.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan metode penelitian kualitatif. ;

2.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Jenggawah Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember pada bulan Juli 2017 sampai dengan September 2017.

2.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP) dana bergulir PNPM Mandiri Perdesaan

2.3 Penentuan Informan

Adapun informan dalam penelitian diskriptif data kualitatif yang sudah ditentukan menurut metode purposive dan kriteria informan, maka yang akan dijadikan informan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK)
2. Ketua Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD)
3. Tim Verifikasi (TV)
4. Ketua dan Anggota Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP)

2.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data primer, melalui wawancara dan observasi.
2. Pengumpulan data sekunder, berupa dokumentasi dan studi kepustakaan.

2.5 Teknik Analisis Data

Metode analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis interaktif yang dibuat oleh Miles dan Huberman (Sugiyono 2011:247).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Implementasi PNPM MPd Tahun 2015-2016 Bidang Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP) Perguliran.

Pelaksanaan kegiatan Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP) Perguliran yang dipelopori oleh PNPM MPd di Desa Jenggawah Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember yang dilaksanakan pada tahun 2015-2016 dalam prosesnya harus melalui tahap-tahap yang ada dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) SPP Perguliran yang dibuat berdasarkan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM MPd yaitu dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap penyelesaian.

1. Tahap Perencanaan

Tahap perencanaan dalam proses penyaluran dana Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP) Perguliran meliputi sosialisasi, Pengajuan proposal, Verifikasi administrasi proposal, verifikasi lapangan, musyawarah pendanaan, dan pengesahan perguliran dan Pendanaan.

a. Sosialisasi

sosialisasi program SPP dilakukan dengan berbagai cara yaitu seperti: sosialisasi langsung kepada kelompok-kelompok oleh UPK, papan informasi dan brosur yang dikeluarkan UPK, melalui pertemuan formal yang dilakukan UPK di Kecamatan yaitu MAD Sosialisasi, dan penyebaran surat dari BKAD kepada kepala desa.

b. Pengajuan Proposal

Pengajuan proposal wajib dilaksanakan untuk kelompok lama atau kelompok baru yang ingin mengajukan pinjaman modal SPP. Proposal di ajukan kepada UPK sebelum verifikasi perguliran dilaksanakan. Didalam proposal tersebut kelompok wajib melampirkan persyaratan yang terdiri atas :

1. Surat pengantar Kepala Desa;
2. Surat permohonan kredit dengan lampiran :

Pengajuan proposal adalah salah satu syarat kelompok jika ingin mengajukan pinjaman. Pengurus kelompok meminta proposal kosong di kantor UPK yang kemudian diisi dengan data-data kelompok termasuk didalamnya dilampirkan fotokopi KTP anggota dan pernyataan ahli waris sebagai penanggung jawab peminjam yang kemudian di ketahui oleh kepala desa masing-masing yang dibuktikan dengan adanya tanda tangan dan stempel kepala desa. Dalam pelaksanaannya kelompok yang mengajukan proposal sudah sesuai dengan yang di atur dalam SOP Perguliran.

c. Verifikasi Administrasi Proposal

Atas permohonan proposal dari kelompok, UPK dan Tim Verifikasi melakukan verifikasi administrasi proposal atau pembahasan awal, yang memuat :

- ✓ Cek list kelengkapan disertai catatan hasil verifikasi administrasi
- ✓ Dokumen pengajuan sebelumnya / perguliran (dokumen proposal)
- ✓ Hasil penilaian kelompok (formulir 84 A dan hasil penilaian)
- ✓ Hasil verifikasi sebelumnya (pada kelompok lama)
- ✓ Data/catatan pendukung lainnya (misal : black list tunggakan, penanganan pinjaman restruktur/rescedulling, pinjaman ditempat lain)

Proposal yang masuk namun tidak lengkap, maka akan dikembalikan pada kelompok agar dilengkapi kembali persyaratan didalam proposal pengajuan tersebut. Dari hasil wawancara, dapat ditarik kesimpulan bahwa verifikasi administrasi proposal atau pembahasan awal telah berjalan sesuai dengan aturan

SOP Perguliran SPP. Yaitu bahwasanya UPK Tim Pendanaan dan Tim Verifikasi telah melakukan verifikasi awal yaitu mengevaluasi atau mengecek kelengkapan pengajuan proposal yang sudah dijelaskan di atas. Namun ada sedikit kekurangan karena ada beberapa kelompok yang tidak melengkapi data yang dibutuhkan dalam proposal sehingga proposal harus dikembalikan ke pengurus kelompok.

d. Verifikasi Lapangan

Verifikasi adalah salah satu tahapan yang terpenting dalam program SPP Perguliran, karena dengan adanya verifikasi lapang UPK dapat mengetahui berapa pemasukan dan pengeluaran calon pemanfaat SPP, dapat mengetahui riwayat keuangan masing-masing anggota, dapat mengetahui berapa nominal angsuran yang mampu dibayar oleh masing-masing anggota serta dapat mengetahui kegiatan usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota.

Langkah-langkah verifikasi lapangan diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Proposal yang akan diverifikasi harus sudah lengkap dan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam SOP Perguliran.
2. Hasil pemeriksaan proposal :
 - ✓ Jika sudah lengkap dan memenuhi syarat, maka bisa dilanjutkan dengan kunjungan lapangan.
 - ✓ Jika tidak, maka dikembalikan kekelompok untuk dilengkapi.
 - ✓ Proposal yang masih memerlukan perbaikan, akan diverifikasi pada siklus berikutnya.
3. Sebelum kunjungan lapangan, BKAD terlebih dahulu melakukan pemberitahuan melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Desa.
4. Pemberitahuan diterima oleh kelompok minimal 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan verifikasi.
5. Proses verifikasi dilakukan dibalaidesa atau tempat pengurus kelompok, dengan menghadirkan semua pemanfaat calon peminjam.
6. Verifikasi dilakukan dengan melihat kelayakan calon pemanfaat sesuai dengan paramater yang tertuang dalam formulir verifikasi usulan.
7. Formulir verifikasi terdiri dari :
 - ✓ Berita acara
 - ✓ Format penilaian perkembangan kelompok
 - ✓ Lembar verifikasi kelompok SPP
 - ✓ Lembar hasil verifikasi
8. Selain pemeriksaan administrasi dan Tanya jawab TV juga akan melakukan pencocokan langsung pada usaha yang dikelola oleh anggota ataupun kelompok.
9. Anggota kelompok yang tidak hadir dalam proses verifikasi akan mengikuti verifikasi susulan maksimal 2 (dua) hari kedepan setelah pelaksanaan, jika diberikan toleransi waktu sebagaimana ayat di atas calon pemanfaat masih

tidak hadir tanpa keterangan yang bias dipertanggungjawabkan maka bisa dinyatakan tidak layak

10. Hasil kunjungan lapangan TV akan dijadikan landasan dalam menyusun rekomendasi.
11. Rekomendasi TV selanjutnya disampaikan dalam Musyawarah Pendanaan Perguliran.

e. Musyawarah Pendanaan

Musyawarah pendanaan adalah forum yang membahas tentang keputusan besaran pinjaman kelompok setelah dilakukan verifikasi lapang yang dalam hal ini diputuskan oleh Tim Pendanaan dan disetujui BKAD. Tim Pendanaan adalah Tim yang bertugas memutuskan Pendanaan terhadap usulan pinjaman kelompok SPP yang telah diverifikasi dan dinyatakan layak oleh Tim Verifikasi.

Setelah melakukan wawancara dengan narasumber dapat disimpulkan bahwa pada tahapan ini yaitu forum pendanaan, kegiatannya sudah berjalan sesuai yang sudah ditetapkan dalam SOP baik itu SOP Perguliran maupun SOP Pendanaan. Nominal pinjaman diputuskan sesuai dengan hasil forum pendanaan. Tim pendanaan adalah orang yang diberikan mandat oleh desanya yang di sahkan oleh Kepala Desa masing-masing. Dalam memutuskan nominal pinjaman forum pendanaan di kecamatan Jenggawah tidak bersifat subjektif karena yang memutuskan bukan hanya dari Tim Pendanaan saja tetapi juga lembaga lain yang hadir dalam rapat tersebut.

f. Pengesahan Perguliran

Berdasarkan pengesahan perguliran yang telah dilakukan oleh BKAD, tim pendanaan menerbitkan surat perintah pecairan, yang kemudian di tindaklanjuti oleh pengurus UPK untuk membuat dokumen pencairan yaitu :

- ✓ Surat Perintah Pencairan
- ✓ Akad kredit/SPK (Surat Perjanjian Kredit)
- ✓ Foto pendanaan
- ✓ Kartu kredit kelompok dan Anggota
- ✓ Berita Acara pencairan
- ✓ Kwitansi pencairan untuk kelompok dan Anggota
- ✓ Tanda Terima Kolektif pencairan SPP

2. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan dalam kegiatan SPP Perguliran merupakan kegiatan pencairan dana SPP yang akan dilakukan oleh UPK diketahui oleh BKAD. Tahap ini semua penerima SPP akan mendapatkan uang pinjaman, jadi penerima SPP wajib datang ke kantor desa atau rumah ketua UPK untuk mengambil uang tanpa harus diwakilkan.

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang proses pencairan SPP Perguliran maka penulis melakukan wawancara dengan Ketua BKAD yaitu Bapak Iqbal. Beliau menjelaskan bahwa :

“... dari pembahasan akhir maka di jadwal pelaksanaan realisasi pinjaman tetapi manaka yang baru dijadwal realisasinya dan untuk kelompok yang sudah lama pinjaman sebelumnya harus terlunasi terlebih dahulu baru ada realisasi pinjaman. Pencairan atau realisasi pinjaman yang wajib hadir adalah anggota kelompok yang akan mendapat pinjaman dan pengurus kelompok kemudian dari lembaga cukup UPK saja. BKAD biasanya datang sesuai dengan sibuk atau tidaknya BKAD.”

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Ketua UPK yaitu Bapak Gunawan, beliau menjelaskan bahwa :

“perlu diingat pencairan bisa dilaksanakan apabila kelompok itu benar-benar sudah lunas dan tidak ada masalah. Dalam SOP Perguliran syarat untuk pinjam SPP kelompok harus mempunyai simpanan dan sudah ada administrasi baik itu tentang riwayat kelompok ataupun keuangan kelompok. Jadi harus punya tabungan kelompok, tidak harus disimpan di Bank yang penting punya kas kelompok. Sedangkan di Eks-PNPM ini syaratnya adalah punya tabungan 10% dari pinjaman, jadi sebelum pencairan dilakukan kelompok harus mempunyai tabungan tanggung renteng terlebih dahulu yaitu sebesar 10% dari total pinjaman. Kebanyakan kelompok ini nominal tabungannya kurang, jadi kelompok itu sepakat bukan karena terpaksa memang harus ada tabungan 10% jadi mau tidak mau harus punya tabungan sebesar itu jadi pada intinya dibuat jaga-jaga mungkin ada satu anggota pada saat setoran punya musibah, jadi bisa dipinjamkan dari tabungan kelompok tersebut, sehingga di kantor tidak sampai menunggak. Sebelumpencairan kelompok harus punya tabungan.”

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan ketua kelompok yaitu Ibu Junaida, beliau menjelaskan bahwa :

“Saat pencairan anggota kelompok yang akan menerima pinjaman wajib membawa KTP asli dan pengurus kelompok wajib membawa materai. Yang wajib hadir adalah anggota kelompok yang sudah tercantum dalam proposal yang sudah diverifikasi. Biasanya kalau anggota saya tidak bisa hadir maka harus ambil uangnya di kantor UPK. Saat pencairan yang wajib di tanda tangani oleh anggota dan pengurus kelompok adalah SPK, Berita acara pencairan yang harus tanda tangan di atas materai, kwitansi pencairan, tanda terima kolektif, setelah itu pengurus kelompok wajib meminta tanda tangan kepada kepala des. UPK juga memberikan buku administrasi dan kartu angsuran anggota.”

3. Tahap Penyelesaian

Penyelesaian merupakan tahap akhir dalam simpan pinjam untuk kelompok perempuan karena dalam tahap ini semua anggota kelompok yang mendapatkan pinjaman SPP Perguliran harus menyelesaikan pembayaran atas bantuan pinjaman yang telah diterima beserta suku bunga yang telah disediakan oleh pelaksana program. Di Desa Jenggawah pembayaran dilakukan tiap bulan selama 12 bulan (12 kali angsuran). Dalam proses pembayaran maka setiap anggota dapat langsung membayar angsuran ke ketua kelompok yang kemudian oleh ketua kelompok akan di bayarkan ke kantor UPK Kecamatan Jenggawah. dalam pelaksanaannya anggota membayar angsuran di kelompok sebesar 2% per bulan selama 12 bulan. Sedangkan ketentuan jasa pinjaman dan lama angsuran kelompok ke Kantor UPK yang di tentukan dalam SOP Perguliran adalah sebagai berikut :

1. Semua pinjaman harus dikembalikan disertai dengan jasa pinjaman.
2. Besarnya jasa pinjaman berdasarkan cara pengembalian pinjaman/resiko pinjaman :
 - a. Pinjaman per-bulan, jasa pinjaman yang dibebankan adalah 18% per tahun flat.
3. Jangka waktu angsuran maksimal 12 (dua belas) bulan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pinjaman dengan angsuran bulanan batas pembayaran angsuran maksimal 12 (dua belas) bulan.
4. Tanggal pembayaran angsuran dan tanggal jatuh tempo pembayaran sesuai dengan tanggal pencairan pinjaman dan dituangkan dalam Surat Perjanjian Kredit (SPK).
5. Kelompok yang melunasi pinjamannya lebih awal dari jadwal yang ditentukan, besaran jasa yang dibayarkan harus dibayarkan adalah tetap sesuai yang tercantum dalam SPK.
6. Kelompok sebagaimana yang disebutkan pada ayat 5 di atas, harus mengikuti prosedur perguliran sebagaimana mestinya dan harus tercatat dalam daftar tunggu perguliran berikutnya.

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang prosedur di atas maka penulis melakukan wawancara kepada Ketua BKAD yaitu Bapak Iqbal, beliau menjelaskan bahwa :

“di jenggawah bunga yang diberikan kepada kelompok adalah 18% per tahun yaitu 1.5% per bulan selama 12 bulan. Sejauh ini jika dilihat dari laporan UPK desa Jenggawah termasuk desa yang memiliki pemanfaat paling banyak dan pinjaman paling banyak, tetapi tunggakannya berada di ranking nomer tiga setelah jatisari dan cangkring. Sementara ini sesuai kesepakatan saat MAD kelompok yang menuinggak tidak kami beri denda tetapi tetap tunggakan pokok dan bunganya tetap dan kami lakukan penagihan secara berkala. Untuk menangani masalah tunggakan

selain kami terjun langsung ke kelompok, di kabupaten jember termasuk di kecamatan jenggawah yaitu bekerja sama dengan kejaksaan negeri jember, jadi tunggakan yang berada dikolek lima bisa ditangani oleh kejaksaan.”

Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara dengan Ketua UPK yaitu Bapak Gunawan, beliau menjelaskan bahwa :

“Kalau bunga kita sistemnya flat atau tetap jadi dalam satu tahun 18% yaitu 1.5% perbulan selama 12 angsuran. Dan kebijakan setoran anggota ke kelompok adalah sesuai dengan ketentuan desa masing-masing, di desa jenggawah bungan untuk anggota ke kelompok adalah 24% pertahun yaitu 2% perbulan selama 12 angsuran. Dulu kita nerapkan denda nominalnya 1% dari jasanya, tetapi selama ini jangankan membayar denda mebayar tunggakannya saja kelompok itu sangat sulit untuk membayar. Untuk mengatasi tunggakan sudah pasti banyak cara yang sudah kami lakukan, yaitu seperti menagih ke anggota kelompok dan pengurus kelompok yang menunggak. Jika tunggakan tidak segera terbayarkan maka kami juga melakukan identifikasi tunggakan, kami cari sebenarnya permasalahannya ada di siapa, apakah ada di pengurus atau di anggota. Untuk menagih tunggakan selama ini yang sering terjun langsung adalah pengurus UPK, kelembagaan selalu hanya merencanakan saja saat rapat koordinasi tetapi realisasinya tidak ada. Saya rasa kerjasama UPK dan kelembagaan yang lain dalam menangani tunggakan kurang maksimal. Saat ini mulai dari tahun 2016 kami juga melakukan kerjasama dengan kejaksaan negri Jember untuk menangani tunggakan, karena SPP ini termasuk asset milik Pemerintah bukan perorangan. Alhamdulillah ada pengembalian setelah bekerjasama dengan kejaksaan meskipun itu tidak maksimal.”

Untuk mengetahui lebih lanjut maka penulis juga melakukan wawancara kepada Ibu Junaida selaku ketua kelompok Apel VII, beliau menjelaskan bahwa :

“Alhamdulillah kelompok saya tidak pernah mengalami permasalahan tunggakan di kantor UPK, memang ada anggota yang terkadang telat setornya tetapi oleh pengurus kelompok kami di pinjami uang kas kelompok terlebih dahulu, sehingga di kantor setorannya selalu tepat waktu. Dan alhamdulillah karena saya kelompok saya tidak pernah menunggak jadi setiap tahunnya mendapat IPTW (Insentif Pengembalian Tepat Waktu). Yang saya tahu, biasanya UPK menagih langsung ke rumah anggota kelompok apabila ada tunggakan di kelompok lain. Saat sosialisasi di acara verifikasi dan pencairan UPK juga menyampaikan bahwa untuk menangani masalah tunggakan, UPK bekerja sama dengan Kejaksaan Negri Jember.”

Dari pernyataan narasumber dapat disimpulkan bahwa dalam menerapkan bunga pada kelompok SPP sudah sesuai aturan SOP Perguliran yang dibuat dan

disepakati bersama, yaitu bunga yang dibebankan adalah 18% pertahun yaitu 1.5% per bulan selama 12 bulan. Untuk melestarikan asset SPP dan menangani masalah tunggakan, Kelembagaan BKAD Kabupaten Jember yang dalam hal ini berada di bawah naungan Dipemasdes telah bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri Jember, sehingga tunggakan SPP dapat terbantu meskipun belum maksimal. Dalam penerapannya tidak ada denda bagi kelompok yang menunggak karena untuk membayar tunggakan saja sudah sangat kesulitan. Untuk menangani tunggakan yang ada realisasinya adalah yang langsung terjun ke kelompok untuk menagih tunggakan ada hanya pengurus UPK saja. Kurangnya kerjasama antara UPK dan Kelembagaan yang lain menyebabkan penagihan tunggakan jadi kurang maksimal.

3.2 Faktor-Faktor Penentu Implementasi PNPMM Mandiri Pedesaan Bidang Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP) Perguliran Desa Jenggawah Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember.

1. Komunikasi

Sosialisasi merupakan tahapan pertama kegiatan implementasi SPP Perguliran dari PNPMM MPd dimana pada tahap ini kelembagaan memberikan gambaran umum dan pemahaman mengenai konsep SPP Perguliran. Dalam sosialisasi SPP Perguliran tidak ada kendala yang berarti, sosialisasi program SPP berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam SOP Perguliran. Yaitu sosialisasi program SPP dilakukan pada saat MAD Sosialisasi, didesa pada saat Verifikasi SPP, dan UPK juga membuat brosur sederhana yang berisikan tentang informasi SPP baik itu tata cara meminjam modal usaha, persyaratan untuk mengajukan proposal, dan juga informasi tentang bunga SPP yang kemudian brosur tersebut disebarluaskan kepada masyarakat dan juga di tempel dipapan informasi yang ada di setiap desa di kecamatan Jenggawah.

2. Sumberdaya

Dalam pelaksanaan SPP Perguliran di desa Jenggawah kendala sumberdaya yang seringkali terjadi adalah pengurus kelompok yang kurang memahami dalam pengisian proposal dan buku administrasi, akibatnya banyak proposal yang dikembalikan kepada pengurus kelompok untuk dilengkapi. Hal ini juga mengakibatkan proses verifikasi menjadi terhambat.

3. Disposisi

Kejujuran adalah unsur yang terpenting dalam pelaksanaan program SPP Perguliran. Kendala yang seringkali ditemukan adalah banyaknya anggota SPP yang tidak jujur saat di verifikasi oleh tim verifikasi yaitu saat ditanya tentang pemasukan dan pengeluaran biaya hidup. Hal ini mengakibatkan angsuran SPP tersendat dan mengalami tunggakan SPP.

4. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi dalam PNPM MPd kecamatan Jenggawah sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, kepengurusan dalam PNPM MPd kecamatan Jenggawah juga sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan SOP. Hanya saja ada sedikit kendala mengenai penagihan tunggakan, yaitu kurangnya kerjasama antara UPK dan Kelembagaan yang lain menyebabkan penagihan tunggakan jadi kurang maksimal.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan beberapa hal, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Tahap perencanaan yang dilakukan yaitu sosialisasi, pengajuan proposal, verifikasi administrasi proposal, verifikasi lapangan, musyawarah pendanaan, dan pengesahan perguliran. Tahap pelaksanaan yang dilakukan oleh pengurus kelembagaan adalah pencairan pinjaman dana SPP Perguliran dari UPK ke anggota kelompok yang dilakukan di balaidesa maupun rumah pengurus kelompok yang dalam pelaksanaannya kelompok harus menandatangani tanda terima kolektif, kwitansi perorangan, daftar hadir, dan berita acara pencairan. Dalam tahapan pelaksanaan sudah sesuai dengan aturan SOP Perguliran yang telah ditetapkan. Tahap penyelesaian adalah bagian akhir dari proses SPP yaitu pengembalian dana pinjaman dari anggota ke kelompok dan kemudian dari kelompok ke UPK. Pada kegiatan ini pengembalian dilakukan sesuai dengan SOP, yaitu pinjaman harus dikembalikan dalam 12 kali angsuran yaitu 12 bulan dengan bunga 1,5 % per bulan dengan bunga flat atau tetap yaitu jumlah total bunga 18% per tahun. Kendala yang dihadapi dalam tahap penyelesaian adalah adanya tunggakan angsuran SPP dari kelompok.
- b. Indikator keberhasilan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd) bidang Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP) Perguliran adalah masyarakat kecamatan Jenggawah khususnya masyarakat desa Jenggawah dapat terbantuan dalam peminjaman modal untuk mengembangkan usahanya. Bunga yang tergolong ringan dan tanpa adanya agunan menjadikan masyarakat tertarik untuk meminjam modal dari SPP Perguliran.

TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih kami persembahkan untuk:

- a. Dosen pembimbing skripsi yaitu Ida Mustikawati, M.Si.;
- b. Informan dalam penelitian, yaitu:
 1. Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK)
 2. Ketua Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD)
 3. Tim Verifikasi (TV)

4. Ketua dan Anggota Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP); dan
 c. Para pihak di lingkungan STIA Pembangunan Jember yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Ruslan. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Amien Rais. M.1995. *Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia*. Yogyakarta: Aditya Media
- Inayatullah, Mathur. K dan. 1980. *Monitoring And Evaluation Of Rural Development: Some Asian Experiences*. Kuala Lumpur, Malaysia: City Press Sdn. Bhd.
- Moekijat. 2000. *Fungsi-fungsi manajemen*. Bandung: MajuMundur
- Moleong, Lexy. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Moleong, Lexy. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Mutrofin. 2006. *Pengantar Metode Riset Evaluasi (Kebijakan, Program dan Proyek)*. Yogyakarta: Laksbag Pressindo
- Nazir, Mochammad. 2003. *Metode Penelitian*. Salemba Empat Jakarta
- Rustiadi E, Saefulhakim S, Dyah P. 2009. *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Crestprent Press dan Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Singarimbun, Masri & Efendi. 1995. *Metode Penelitian Survai*. Jakarta: PT. Pustaka. LP3ES Indonesia
- Siagian, Sondang, P. 1999. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta : Haji Masagung
- Subarsono, 2005. *Analisis kebijakan publik*. Yogyakarta. Pustaka Belajar.
- Soenarko, Sd. H. 2000. *Public Policy*. Surabaya: Erlangga.
- Suharto, E 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistiyani. 2004. *Kemitraandan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Guna Media.
- Tayibnapis, FY. 2000. *Evaluasi Program*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 1988. *Manajemen Pembangunan*. Jakarta : Haji Masagung
- Usman, H, Akbar, P.S. 2003. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winarnno, Budi. 2002. *Teori dan Prosedur Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia. 2009. *PTO (Petunjuk Teknik Operasional) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan*. Jakarta. Tim Koordinasi PNPM Mandiri Perdesaan

Internet

- (<https://jenggawah.wordpress.com>) di akses pada jam 11.23 wib tanggal 24 juli 2017.
- (<http://pnpn-jatim.blogspot.co.id>) di akses pada jam 14.32 wib tanggal 30 maret 2017.
- (<http://uzumet.blogspot.co.id/2014/12/motto-hidup-berdasarkan-al-quran-dan.html>) di akses pada jam 13.36 wib tanggal 29 Agustus 2017.